BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Ilmu hubungan internasional merupakan turunan dari pada ilmu politik yang secara historis sebelum abad ke 17, batas negara masih disebut emporium dengan konsep feodal atau keturunan hingga akhirnya pada abad ke 17 yang biasa disebut masa pencerahan atau aufklarung, ilmu hubungan internasional muncul yang ditandai dengan munculnya ahli-ahli politik di dunia.

Kemunculan ilmu hubungan internasional juga merupakan salah satu dampak dari perang dunia pertama yang mana banyak memakan korban baik materiil maupun korban jiwa. Maka dari itu muncullah pemikiran untuk menghentikan perang yang dipicu oleh penembakan Frans Ferdinand di Sarajevo. Penyebab utama yaitu adanya disharmonisasi antar negara di Eropa pada masa revolusi industri yang menghasilkan perkembangan teknologi sehingga menyebabkan kecurigaan militer antar negara yang membuat negara-negara berlomba memajukan kekuatan militernya namun secara terselubung. Maka dari itu ilmu hubungan internasional diharapkan dapat menyelesaikan perang antar negara, karena itu juga ilmu hubungan internasional bersifat interdisipliner karena mengikuti perubahan yang terjadi di dunia.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai apa itu teori hubungan internasional. Menurut Mochtar Mas‟oed,

> "Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara di dalam area transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional." (Mas‟oed, 2000:28).

Menurut Mas‟oed, hubungan internasional itu bermain pada interaksi dengan tujuan mempelajari perilaku internasional yang diaplikasikan dalam bentuk kerjasama, pembentukan aliansi bahkan perang dan konflik. Seperti halnya hubungan antara Iran dan Tiongkok yang terbentuk antara 2 negara yang pada dunia internasional memiliki kepentingan nasional yang saling menguntungkan sehingga perilaku yang ditunjukkan adalah kerjasama antara kedua negara tersebut.

J. C. Johari memberikan pendapatnya dalam *New Comparative Government* mengenai definisi dari hubungan internasional, yaitu

"Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara *(non states actors)*

yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara." (Johari, 2006:16).

Pengertian Hubungan Internasional menurut Charles Mc Clelland yang dikutip oleh Perwita dan Yani adalah sebagai berikut:

> "Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara- negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara" (Perwita dan Yani, 2005:4).

Ilmu Hubungan Internasional adalah ilmu yang subyektif. Cabang ilmu ini masih saling ketergantungan dengan cabang ilmu lainnya, seperti: Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Kriminologi, Psikologi, Geografi, Hukum Internasional, Antropologi, Filsafat dan masih ada beberapa cabang ilmu lainnya yang termasuk dalam studi ilmu Hubungan Internasional. Kita dapat menerima bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah istilah yang lebih luas dari pada Politik Internasional (Ambarwati, & Wijatmadja, 2016:37).

Dari sejarah pekembangannya studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yaitu dimana hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek ilmu-ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuannya saling timbal balik. Dari sejarah perkembangan hubungan internasional, secara umum dapat dinyatakan bahwa ilmu hubungan internasional lahir dengan tujuan untuk mencegah perang dan membangun perdamaian. Sehingga secara serius terdapat upaya-upaya untuk memunculkan ilmu yang benar-benar mandiri (Darmayadi, 2015 : 12).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antara aktor suatu negara dengan negara lainnya, namun pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya hubungan antar negara saja, tetapi juga hubungan antar individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang mempunyai kepentingan, sehingga negara tidak selalu menjadi aktor utama tetapi merupakan aktor yang rasional yang dapat melakukan hubungan melewati batas negara. Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani menyatakan:

> “Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor dan anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga

> interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005:34).

Banyak definisi yang dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan studi Hubungan Internasional. Karen Mingst menyatakan bahwa Hubungan Internasional adalah studi yang mempelajari tentang interaksi diantara berbagai macam aktor yang berpatisipasi dalam politik internasional, yang mencakup negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintah local, dan para individu (Mingst, 1999:2).

Steve Chan mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi antara aktor-aktor yang tindakan-tindakannya atau kondisi-kondisinya memiliki konsekuensi akibat yang penting bagi pihak-pihak lain diluar yuridiksi efektif unit politik (negara) mereka. Dengan definisi seperti itu, Steve Chan masih merasa perlu untuk memperluas dan menjelaskan beberapa istilah:

1. Interaksi mengimplikasikan pengaruh yang bersifat mutual dan resiprokal.
2. Pendefinisian ala Steve Chan menghindari penggunaan istilah *nations* (bangsa) karena istilah ini masih merupakan konsep yang belum *fixed*.
3. Pembedaan antara interaksi domestik dan internasional lebih ditekankan pada dampak yang ditimbulkannya dibanding pada dikotomi dalam-luar negeri.
4. Aktor-aktor dalam pendefinisian hubungan internasional diatas hanya memasukkan aktor-aktor yang penting. Hanya saja, derajat pentingnya aktor-aktor tersebut bervariasi sesuai dengan isu-isu dan keadaan yang terjadi (Chan, 1984:5-6).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, kami berpendapat bahwa hubungan internasional adalah interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh para

aktor dipanggung internasional, melintasi batas-batas kedaulatan negara. Aktor dalam hubungan internasional mencakup aktor negara dan bukan negara. Semua interaksi yang dilakukan merupakan fokus kajian studi Hubungan Internasional. Oleh sebab itu, ilmu hubungan internasional merupakan bidang studi yang dipelajarinya sangat beragam. Bidang-bidang yang dikajinya mencakup banyak hal, seperti:

Politik internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, organisasi internasional, diplomasi, analisa politik luar negeri, studi strategis, konflik dan perdamaian, dan ekonomi politik internasional.

2.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu kajian hubungan internasional. Aktor utama dalam politik luar negeri adalah negara, walaupun dalam kenyataannya non state aktor saat ini dapat melakukan hubungan internasional, namun dalam politik luar negeri, negara masih memegang peranan yang terpenting. Politik luar negeri juga merupakan identitas sebagai karakteristik pembeda tiap negara. Politik luar negeri adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Perwita & Yani, 2005:7).

Setiap negara tentunya memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, namun untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, setiap negara harus melakukan kerjasama dengan negara lain, dan tujuan utama politik luar negeri adalah kepentingan nasional tersebut. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya tersebut negara akan melakukan

kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Politik luar negeri merupakan poros dibentuknya kebijakan luar negeri.

Terdapat 3 proses dalam politik luar negeri, yaitu kerjasama, konflik atau hidup berdampingan.

Politik luar negeri memiliki 3 jenis:

1. Jangka pendek, politik luar negeri ini direncanakan untuk jangka waktu maksimal 5 tahun untuk sesuatu yang bersifat insidental.
2. Jangka menengah, politik luar negeri direncanakan untuk waktu diatas 5 tahun.
3. Jangka panjang, merupakan politik luar negeri yang dibuat dengan berlandaskan pada konstitusi dan ideologi.

Politik luar negeri juga memiliki 3 faktor, pertama idiosinkretik atau karakter pemimpin negara, kedua kapasitas negaranya dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang ketiga environment atau lingkungan dalam negara tersebut. Ketiga hal tersebut merupakan pertimbangan utama dalam politik luar negeri.

Hasil dari politik luar negeri atau keputusan politik luar negeri terdiri dari 3 hal, yaitu:

1. Pragmatis atau terencana yang merupakan hasil yang bersifat jangka panjang, membuat studi lanjutan, pertimbangan dan evaluasi yang mendalammengenai seluruh opsi alternative.
2. Kedua krisis yang terbentuk dalam keadaan terancam dengan waktu terbatas dan ada elemen yang mengejutkan yang membutuhkan respon yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Ketiga yaitu taktis yang mana keputusan yang diambil masih memerlukan reevaluasi dengan jangka waktu yang lebih panjang dan bersifat pragmatis. (Couloumbis & Wolfe, 1999:129).

Politik luar negeri adalah serangkaian keputusan-keputusan pemerintahan yang dilakukan atas nama negara yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di panggung internasional. Istilah luar (*foreign)* dalam politik luar negeri merujuk pada apapun yang berada diluar batas-batas negara tertentu dan istilah *policy* didefinisikan sebagai suatu petunjuk, pedoman, pembimbing pada tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menyadari tujuan-tujuan negara yang telah dirumuskan oleh negara itu sendiri (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:126).

Dalam pandangan Andrew Heywood, politik luar negeri merujuk kepada usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi atau mengatur peristiwa-peristiwa di luar wilayah negaranya, biasanya, meski tidak selalu, melalui hubungan mereka dengan pemerintah negara lain (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:127).

Perilaku politik luar negeri yakni tindakan-tindakan yang dilakukan negara terhadap negara lain dan sebaliknya, sangatlah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik luar negeri adalah faktor internasional, faktor dalam negeri dan faktor individu pembuat keputusan (Kegley dan Raymond, 2010:60-73).

Sebagai landasan teori politik luar negeri memiliki faktor yang sangat penting yang dikemukakan oleh Robert D. Cantor sebagai berikut:

> “Faktor Internasional atau faktor sismetik merupakan diluar negara yang ada dalam sistem internasional yang melingkupi negara tersebut. Sistem internasional bias didefinisikan sebagai serangkaian hubungan diantara negara-negara yang berinteraksi. Dalam hal ini sistem internasional terdiri

> atas negara-negara yang secara teratur berinteraksi satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi tindakan negara-negara besar" (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:129).

Disebutkan juga oleh Charles W. Kegley Jr., dan Gregory A. Raymond dalam faktor Domestik sebagai berikut:

> "Ada banyak faktor domestik yang mempengaruhi terhadap politik luar negeri, namun dalam tulisan ini hanya dikemukakan empat faktor utama, yaitu: kapabilitas militer, tingkat perkembangan ekonomi, tipe pemerintahan dan struktur dan proses organisasi (Kegley dan Raymond, 2010:64).

Sekalipun faktor internasional dan domestik banyak memengaruhi politik luar negeri, namun pada akhirnya yang merumuskan kebijakan adalah para pembuat keputusan (*decision makers*). Karena itu faktor individu decision maker ini penting bagi hasil output politik luar negeri. Hal ini berkaitan dengan faktor idiosinkretik. Pribadi dan karakteristik individu berbeda-beda sehingga keputusan yang di ambil juga bisa berbeda dalam situasi yang sama. Individu bisa dibedakan atas dasar padangannya terhadap dunia atau atas dasar temperamennya. Ada individu yang sabar, toleran dan ada yang pemarah dan intoleran. Kesemuanya itu akan memengaruhi politik luar negeri manakala mereka menjadi pembuat keputusan (Ambarawati & Wijatmadja 2016:131).

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan di suatu negara untuk menghadapi negara lain atau aktor politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dengan demikian kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai

kepentingan nasional masyarakatnya, meski kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu juga ditentukan oleh siapa yang berkuasa dalam kurun waktu tersebut (Mas'oed, 1994:184).

Tujuan kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi dimasa depan suatu negara, dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu.

Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan Kebijakan luar negeri suatu negera yaitu :

1. Nilai : yang menjadi tujuan para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain (Holsti, 1987 :190)

Sedangkan terdapat empat kondisi atau variabel yang mampu menopang pertimbangan elit pemerintah dalam pemilihan strategi Kebijakan luar negeri menurut Holsti yaitu :

1. Struktur sistem internasional, yaitu suatu kondisi yang didalamnya terdapat pola-pola dominasi, sub-ordinasi, dan kepemimpinan.

2. Strategi umum Kebijakan Luar Negeri berkaitan erat dengan sifat kebutuhan sosial-ekonomi domestik dan sikap domestik.
3. Persepsi elit pemerintah (pembuat UU) terdapat tingkat ancaman eksternal.
4. Lokasi geografis, karakteristik, topografis, dan kandungan sumber daya alam yang dimiliki negara (Holsti, 1987: 133-134).

Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan:

> "Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional" (Plano dan Olton,1999:5).

Dalam suatu negara, kebijakan luar negeri menjadi sebuah tindakan penting yang harus diambil guna menjaga hubungan negaranya dengan negara lain karena kebijakan luar negeri merupakan bentuk sikap negara tersebut untuk menunjukkan peran negara dalam sistem internasional yang dapat membuat negara-negara lain ingin melakukan kerjasama bila memiliki kesamaan tujuan. Kebijakan luar negeri juga digambarkan sebagai sebuah sikap yang mana dalam perspektif ini kebijakan luar negeri dipandang sebagai suatu sistem yang keputusannya dirumuskan dan direncanakan untuk melakukan eksekusi (Dugis, 2007:41).

Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi atau rencana tindakan yangdibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan. Menurut Rossenau kebijakan luar negeri adalah semua sikap dan aktifitas yang melalui itu masyarakat nasional yang terorganisasi berusaha untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari lingkungan

internasional (Rudy 2002:27).

Kebijakan luar negeri juga didefinisikan adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain. Negara tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan nasional suatu negara. Tujuan suatu negara dalam melakukan kebijakan luar negeri ataupun dalam pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan nasional negara tersebut (Wahjono dan Syamsudin, 2011:499).

Menurut Tayfur kebijakan luar negeri merupakan sebuah bentuk kegiatan resmi yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh agen-agen resmi dari Negara berdaulat sebagai sebuah orientasi, rencana, komitmen, dan tindakan yang ditujukan kepada lingkungan eksternal Negara (Tayfur, 1994:113-141).

Selanjutnya menurut Kegley dan Wittkopf kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang didasari adanya kepentingan dan tujuan nasional serta sekaligus terdapat nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut (Eugene, 2001:55).

Sedangkan menurut Mark Webber dan St.Smith kebijakan luar negeri ialah suatu kebijakan yang terdiri dari upaya mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil oleh negara dimana pemerintah sebagian besar mengambil andil dalam bertindak dengan pihak luar atau lingkungan eksternal, selain itu turut mengontrol masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan luar (Webber dan Smith, 2002:11-12).

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik

internasional lainnya,dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Menurut Rosneau pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu Negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Langkah–langkah dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup :

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik
2. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan (Adam, 2004:119-120).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan

kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.

Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power)* dan kepentingan (*interest),* yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh fakto-faktor domografi, karekter, budaya, bahkan sejarah negara membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutanKepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya.. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani 2005 : 35).

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah hubungan.

> "Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy, kepentingan nasional yaitu: Kepentingan nasional (*national interest)* merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy. 2002 : 116).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan *non-vital* yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu. 2008 : 67-69).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan. Kekuasaan memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan *(power*). Namun kapabilitas ini

merupakan definisi *power* yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan yang bersifat dinamis. Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (Rudy, 2002: 116).

2.1.5 Diplomasi

Diplomasi merupakan proses untuk melakukan komunikasi antar negara melalui jalur-jalur resmi perwakilan juga mengalami perubahan. Dengan meningkatnya peran aktor non state dalam hubungan internasional, diplomasi mengalami perubahan dari yang semula bersifat *state centric* menjadi bervariasi derajatnya. Dari *state centric* hingga yang berorientasi antar warga negara (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:139).

Diplomasi adalah seni atau ilmu yang harus dilakukan sehubungan dengan transaksi urusan-urusan antar negara-negara berdaulat dengan menggunakan sarana agen-agen terakreditasi (diakui) dan menurut hukum internasional, metode atau prosedur yang diterapkan dalam manajemen negoisasi internasional (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:146).

Diplomasi dalam dunia politik mengacu pada suatu proses komunikasi antara aktor-aktor internasional melalui upaya negoisasi untuk menyelesaikan konflik. Proses ini

telah diperbaharui, diinstitusionalisasikan dan diprofesionalkan di beberapa negara-negara di dunia. Sedangkan pengertian diplomasi dalam kaitannya dengan dengna kebijakan luar negeri adalah fungsi diplomasi sebagai suatu instrumen kebijakan dalam sebuah asosiasi dengna instrumen lain seperti ekonomi atau kekuatan militer untuk memungkinkan aktor-aktor internasional mencapai tujuan politiknya (Michael & White, 1995:388-389).

2.1.6 Teori Konflik

Menurut Webster, istilah konflik di dalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian, peperangan, atau perjuangan" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain (Dean & Rubin, 2004:9) Indikator adanya kehadiran konflik adalah jika didalamnya terdapat unsur-unsur seperti:

1. Adanya ketegangan yang diekspresikan.
2. Adanya sasaran tujuan atau pemenuhan kebutuhan yang dilihat berbeda, yang dirasa berbeda, atau yang sesungguhnya bertentangan.
3. Kecilnya kemungkinan untuk pemenuhan kebutuhan yang dirasakan.
4. Adanya kemungkinan bahwa masing-masing pihak dapat menghalangi pihak lain dalam mencapai tujuannya.
5. Adanya saling ketergantungan. (Chandra, 1992:3). Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai:
6. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.

7. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya; pertentangan pendapat, kepentingan, atau pertentangan antarindividu).
8. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan.
9. Perseteruan. (Pickering, 2001:3).

Melakukan identifikasi sebab-sebab terjadinya konflik, dua diantaranya:

1. Teori kebutuhan massa, berasumsi bahwa konflik yang berakar sangat dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, atau sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Isu yang mengemuka adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi.

1. Teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam oleh pihak lain. Unit analisis terjadinya konflik antara masyarakat atau etnis dengan negara dapat dipetakan dalam dua kategori besar yakni;
2. Konflik domestik belaka yang tidak kemudian berimbas dengan proses pemisahan secara politik ataupun teritorial.
3. Konflik antara negara dengan masyarakat atau etnis yang berimplikasi terhadap proses pemisahan diri dari negara. Kategori yang kedua ini kemudian menjadi diskursus konflik dalam wacana separatisme (Surwandono dan Ahmadi, 2011:7-8).

2.1.7 Konsep *Energy Security*

Keamanan energi bukan hanya berfungsi sebagai ilmu yang hanya khusus mempelajari isu energi sebagai sumber daya alam (*resources issues*) saja, namun juga dibahas dalam berbagai wacana pengambilan kebijakan pemerintah, politik luar

negeri, maupun masyarakat di seluruh dunia. Isu energi masuk ke dalam cakupan studi keamanan (*security studies*) melalui proses yang disebut dengan sekuritisasi isu (*issue securitization*). Menurut Barry Buzan proses pengidentifikasian isu, politik maupun non-politik, bertujuan untuk menjadikan isu tersebut sebagai agenda atau program keamanan. Oleh karena itu, sekuritisasi bisa juga dilihat sebagai bentuk lain dari politisasi isu . Meski demikian, belum ditemukan satu konsep tunggal yang seragam karena para ahli dan pengamat mendefenisikan konsep keamanan energi ini secara berbeda- beda, sejalan dengan penekanan dimensi yang berbeda juga (Sagena dan Monthy, 2012:136-152).

Konsep *energy security* suatu negara dipengaruhi kondisi internal suatu negara dan kondisi eksternal suatu negara. Kondisi internal yang mempengaruhi suatu negara seperti halnya negara harus mencari kebutuhan suplai minyaknya ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Melalui kondisi internal tersebut, maka kebijakan luar negeri suatu negara akan bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yaitu mencari suplai energinya ke negara lain untuk mendapatkan persediaan energinya yang cukup. Setelah mendapatkan persediaan energinya yang cukup, setiap negara yang tergantung pada impor akan tetap menjaga keamanan distribusi minyak dengan melakukan berbagai upaya melalui kebijakan luar negerinya. Hal ini dikarenakan *energy security* telah menjadi permasalahan yang sangat serius. Hal ini mengingat isu-isu keamanan domestik maupun internasional belakangan ini sering muncul dari masalah keamanan energi, seperti ancaman kelangkaan minyak, harga minyak dunia yang tinggi, risiko blokade jalur perdagangan minyak dunia, risiko

embargo negara produsen minyak, risiko gangguan pipa atau fasilitas minyak lain, dan sejenisnya (Maso'ed, 1990:68)

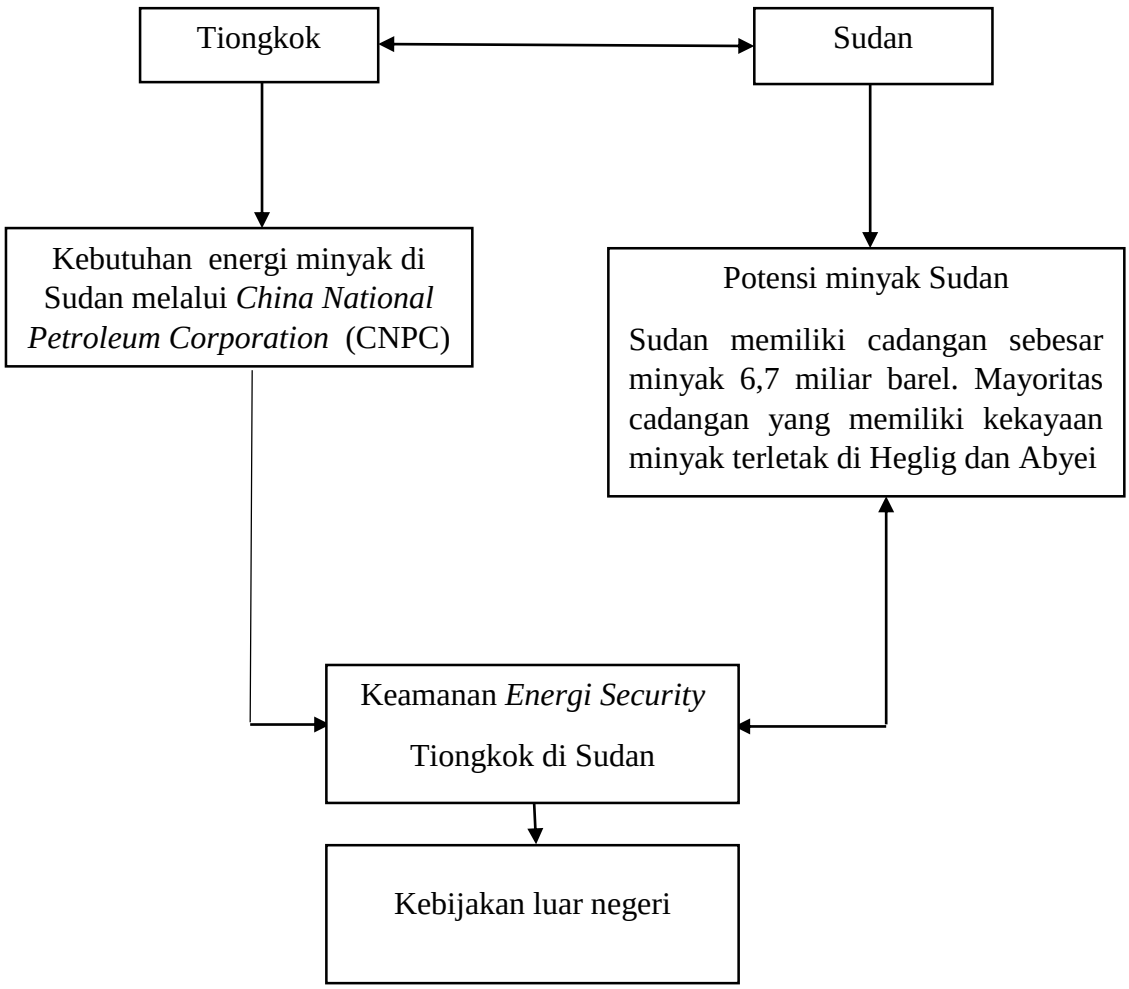
2.2 Kerangka Pemikiran

Perkembangan Industri Tiongkok terutama di bidang Otomotif, urbanisasi penduduk dari desa ke kota menyebabkan tingginya konsumsi bahan bakar cair. Sedangkan, produksi dalam negeri Tiongkok tidak mampu lagi untuk menekan besarnya penggunaan konsumsi energi. Permasalahan tersebut telah memaksa Tiongkok harus mencari suplai minyak ke negara lain. Selama ini, sumber utama minyak Tiongkok masih berasal dari negara–negara Arab namun Tiongkok melakukan diversifikasi rute impor. Hal ini bertujuan untuk tidak bergantung kepada satu produsen suplai minyak saja, maka dari itu Tiongkok mencoba untuk melakukan ekspansi ke negara–negara Afrika salah satunya yaitu Sudan. Hubungan Tiongkok dengan Sudan berlangsung semenjak Sudan menjual saham kepada perusahaan minyak tiongkok. Minyak Sudan dikelola oleh perusahaan Minyak Tiongkok yaitu *China National Petroleum Corporation* (CNPC) dan selama ini CNPC telah mengelola beberapa blok eksplorasi minyak di Sudan.

Negara-negara tempat ekspansi Tiongkok rentan terjadinya konflik internal seperti halnya yang terjadi di Sudan. Konflik internal yang terjadi di Sudan telah mengganggu jalannya kegiatan eksplorasi minyak Sudan seperti terjadinya konflik yang mengakibatkan shutdownnya produksi minyak Sudan. Selain itu, adanya upaya dari Sudan untuk memblokade jalur pipa minyaknya yang digunakan Sudan Selatan untuk mendistribusikan hasil produksi minyak. Oleh karena itu, Tiongkok sebagai investor utama minyak Sudan melalui CNPC perlu untuk mengamankan suplai minyaknya dan

tetap menjaga keamanan distrisbusi minyak tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu Bagaimana kebijakan Tiongkok terhadap kebutuhan suplai energi minyaknya di Sudan melalui CNPC.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran